| STIMULUS SELAMA PANDEMI |

MESIN PROPERTI MULAI MENDIDIH

Beberapa pengembang properti mulai merasakan manfaat dari paket stimulus dan insentif sektor properti yang diguyurkan pemerintah pada awal tahun ini. Sayangnya, pengembang perumahan kelas kecil masih gigit jari.

Yanita Petriella & Hendra Wibawa
redaksi@bisnis.com

Pemerintah termasuk serius mendorong konsumsi dengan mengguyur stimulus dan insentif sektor properti.

Stimulus untuk sektor properti diawali pada 18 Februari 2021 saat Bank Indonesia (BI) memangkas BI 7-Days Repo Rate menjadi 3,5%. BI juga menetapkan uang muka 0% untuk kredit properti.

Tak sampai sebulan, pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah untuk rumah tapak dan rumah susun (apartemen) siap huni seharga kurang dari Rp2 miliar. Pemerintah juga memberi diskon PPN 50% untuk rumah tapak dan apartemen harga Rp2 miliar—Rp5 miliar.

Ciputra Group adalah salah satu pengembang properti kelas kakap yang senang akan kehadiran stimulus dan insentif dari pemerintah.

Marketing Director Ciputra Residence Yance Onggo mengatakan stimulus uang muka atau *down payment* (DP) 0% dan PPN 0% terbukti mendongkrak minat pembelian rumah siap huni atau *ready stock* pada Maret 2021 dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Dia membeberkan penjualan perumahan di Citra Maja Raya melesat 608%, sementara di Citra Raya Tangerang juga meningkat 400%.

"Ini membuktikan insentif yang diberikan pemerintah memberikan dampak positif. Bukan hanya pada rumah *ready stock*, melainkan juga yang bukan *ready stock*. Paling tidak *awareness* [kesadaran] masyarakat terhadap properti sudah meningkat lagi di 2021," katanya kepada *Bisnis*, belum lama ini.

Setelah ada insentif tersebut, Yance melanjutkan banjir permintaan properti bukan hanya dari rumah tapak melainkan juga ruko dan apartemen yang sempat tertekan karena pandemi Covid-19. Namun, dia mengatakan peningkatan permintaan apartemen dan ruko tidak semasif rumah tapak pada proyek *township* Ciputra Group.

"Setelah adanya insentif pemerintah itu, penjualan ruko juga ter-*boosting*. Bahkan apartemen juga bertumbuh walau mungkin pertumbuhan penjualan tidak sekencang rumah atau ruko, tapi paling tidak ada pergerakan," tuturnya.

PT Intiland Development Tbk., juga merasakan hal yang sama. Direktur PT Intiland Development Tbk. Archied Noto Pradono mengatakan stimulus dan insentif yang diberikan pemerintah berdampak positif pada meningkatnya penjualan baik rumah tapak maupun properti *high rise*.

"*Traffic* penjualan naik, lalu penjualan yang sedang diproses jadi bisa *closing* cepat karena insentif ini. Dengan begitu, calon konsumen baru, mempercepat kebutuhan rumahnya," tuturnya.

Namun, Archied berharap pemerintah memperpanjang masa pemberlakuan insentif PPN lebih dari 6 bulan. Adapun, insentif PPN ini hanya berlaku dari Maret-Agustus 2021.

Dengan waktu pemberlakuan insentif yang singkat, dia mengatakan memang membantu dalam menjual properti *ready stock*. Namun, penjualan rumah inden sulit mendapatkan insentif PPN karena berlaku hanya 6 bulan.

Dia meyakini pencapaian penjualan properti bisa lebih baik dari pencapaian tahun lalu karena banyak stimulus yang diberikan pemerintah untuk sektor properti. "Kami berharap bisa diperpanjang lebih lama dari 6 bulan dan nantinya juga berlaku untuk rumah inden," kata Archied.

MINAT APARTEMEN

Division Head of Marketing & Promotion Nava Park Wanto Ngali juga mengatakan apartemen Marigold Botanic Living di Serpong Tangerang Selatan seharga Rp1,5 miliar sampai dengan Rp4,5 miliar sangat diminati pembeli. Hal itu didorong salah satunya insentif PPN ditanggung pemerintah dan stimulus DP 0%.

"Per 31 Maret, dari 200 unit dua *tower* 5 dan 6 yang masih tersedia sebanyak 98 unit, kurang lebih karena bergerak terus *stock*-nya," ujarnya kepada *Bisnis*.

Apartemen Marigold Botanic Living memiliki enam *tower*, dengan masing-masing *tower* 100 unit. Dia menyatakan tower 1, 2, 3, dan 4 sudah terjual dan dihuni. Untuk tower 5 dan tower 6 kini siap huni.

Menurutnya, insentif PPN dan stimulus DP 0% sangat membantu penjualan unit di Marigold Botanic Living karena tren kenaikan penjualannya bisa mencapai dua kali lipat.

"Ini insentifnya sangat membantu penjualan, terbukti penjualan unit di Marigold Botanic Living saat adanya insentif ini mencapai dua kali lipat," katanya.

Dia menuturkan Nava Park kemungkinan membuka unit di tower 7 apabila antusiasme pembeli cukup tinggi untuk Marigold Botanic Living *tower* 5 dan *tower* 6. Saat ini, pembangunan tower 7 dikebut dengan progres sebesar 90%.

Kelebihan Marigold Botanic Living memiliki pemandangan Botanic Park seluas 10 hektare dan terdapat sekitar 1.200 pohon dengan berbagai jenis.

Fasilitas yang tersedia seperti *romantic spring lake, lake side plaza, central plaza, camping ground, panoramic viewing deck, golfer park, kiteflying park, BBQ pit, jogging track & cycling track, outdoor fitness,* dan *birdland*.

Fasilitas taman tersebut didesain oleh arsitek internasional dari Singapura, Ramboll, dengan tiga tema zona yakni aktivitas, komunitas, dan inspirasi.

"Tentu fasilitas taman ini membuat kelebihan tersendiri bagi penghuni Nava Park," ucap Wanto.

Sementara itu, Manager Non-Subsidized Mortgage and Consumer Lending Division Bank BTN Romeo Daniel Makenru van Enst berpendapat stimulus dan insentif dari pemerintah berdampak pada perbaikan properti khususnya untuk kalangan perbankan.

Dia mencatat realisasi kredit kepemilikan rumah (KPR) khususnya nonsubsidi meningkat pada Maret 2021.

"Jadi DP 0% dan insentif PPN ini sangat positif bagi konsumen dan developer sehingga kami perbankan juga turun terdampak. Banyak yang mengajukan apply ke BTN. Jadi stimulus dan insentif ini ada euforianya," ujarnya.

Adapun, target penyaluran KPR nonsubsidi hingga akhir tahun mencapai Rp11,2 triliun. Pada Maret 2021, realisasi KPR nonsubsidi naik 40%.

MINIM SOSIALISASI

Stimulus sektor properti baik berupa bebas PPN, kebijakan uang muka 0%, hingga tren suku bunga rendah sudah berjalan hampir 1 bulan. Namun, masyarakat belum banyak mengetahui beberapa stimulus itu. Perlu upaya lebih agar stimulus bisa termanfaatkan.

Jumlah Hunian *Ready Stock* di Indonesia Per 1 Maret 2021

Jenis	Stok (unit)
Rumah subsidi	21.321
Rumah nonsubsidi harga Rp300 juta-Rp1 miliar	9.000
Apartemen harga Rp300 juta-Rp1 miliar	7.500
Rumah harga Rp1 miliar-Rp2 miliar	9.000
Rumah harga Rp2 miliar-Rp3 miliar	4.500
Rumah harga Rp3 miliar-Rp5 miliar	4.500
Rumah harga Rp5 miliar	1.800

Jenis Insentif PPN Sektor Perumahan Selama 1 Maret-31 Agustus 2021

Jenis	Harga	PPN Ditanggung Pemerintah
Rumah tapak/rusun	Paling tinggi Rp2 miliar	100%
Rumah tapak/rusun	Di atas Rp2 miliar-Rp5 miliar	50%

Sumber: *Kementerian PUPR*

BISNIS/AMIRA YASMIN

| PENAIKAN TARIF DI TANJUNG PRIOK |

IPC Didorong Lebih Inovatif

Bisnis, JAKARTA — PT Pelabuhan Indonesia II/IPC diharapkan meningkatkan fasilitas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menyusul pemberlakuan tarif baru layanan peti kemas di pelabuhan tersebut.

Pakar maritim dari ITS Surabaya Raja Oloan Saut Gurning mengatakan pengguna jasa Pelabuhan Tanjung Priok berekspektasi lebih besar terkait dengan proses bisnis serta peningkatan fasilitas dari penaikan tarif layanan yang dilakukan IPC.

"Jadi ekspektasi yang diharapkan adalah inovasi yang dihasilkan oleh efisiensi, ketimbang akibat investasi yang pada ujungnya masih belum memberikan nilai daya saing," ujarnya, Rabu (14/4).

Saat ini, biaya *container handling charge* (CHC) di Indonesia masih berkisar US$110 per TEUs—US$120 per TEUs. Padahal, biaya CHC di Singapura US$60 per TEUs—US$70 per TEUs, Malaysia US$ 80 per TEUs—US$90 per TEUs.

Ekspektasi lain pengguna jasa adalah usaha infrastruktur dan suprastruktur yang dilakukan pengelola dapat mendorong pada peningkatan *throughput* sekaligus efisiensi biaya CHC. Namun, Saut menilai langkah IPC menaikkan tarif layanan peti ekmas diimbangi dengan adanya kompensasi penurunan tarif progresif dari 900% menjadi 600% untuk waktu penumpukan lebih dari 3 hari.

RESPONS DEPALINDO

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro menilai penyesuaian tarif Lift On Lift Off (Lo-Lo) dan penumpukan peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok bisa diterima.

Apalagi, dia menilai permintaan asosiasi untuk menghapuskan *cost recovery* dan tarif *storage* dipenuhi oleh IPC.

"Sebagai pengguna jasa kami memahami keputusan Pelindo II untuk menyesuaikan tarif peti kemas di Tanjung Priok. Apalagi tarif peti kemas ini sesungguhnya hanya 0,5% dari biaya logistik ekspor-impor," kata Toto.

Selain tarif seperti Lo-Lo dan storage, komponen biaya yang harus dibayar oleh pelaku usaha ekspor-impor sebenarnya beragam mulai dari *ocean freight, trucking, forwarding* dan lainnya. ***(Rahmi Yati/Anitana W. Puspa)***

ASTRA AGRO LESTARI

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk

PT Astra Agro Lestari Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:

A. Hari/Tanggal : Rabu, 14 April 2021
Waktu : 09.02 WIB – 09.34 WIB
Tempat : Catur Dharma Hall, Menara Astra Lt.5
Jl. Jend.Sudirman Kav.5-6
Jakarta 10220

B. MATA ACARA RAPAT
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020.
3. a. Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
b. Penentuan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.
5. Persetujuan perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan

C. KEHADIRAN

- **Direksi**
1. Santosa — Presiden Direktur
2. Joko Supriyono*) — Wakil Presiden Direktur
3. Mario Casimirus Surung Gultom — Direktur
4. Ir. Muhammad Hadi Sugeng Wahyudiono*) — Direktur
5. Rujito Purnomo*) — Direktur
6. Nico Tahir*) — Direktur
7. Said Fakhrullazi*) — Direktur

- **Dewan Komisaris**
1. Chiew Sin Cheok*) — Presiden Komisaris
2. Johannes Loman*) — Komisaris
3. Sidharta Utama*) — Komisaris Independen
4. Drs Aridono Sukmanto*) — Komisaris Independen

**) Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi (video conference*

D. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat mewakili saham 1.637.384.548 saham (85,073%) dari total 1.924.688.333 saham.

E. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat :

Direksi Perseroan telah melakukan Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan, mempublikasikan Pengumuman, Pemanggilan, dan Ralat Pemanggilan kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Dalam Rapat terdapat 1 (satu) Pemegang Saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :
- Keputusan Rapat diambil dengan cara pemungutan suara, bukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- Pemegang Saham/kuasanya yang tidak setuju dan yang memberikan suara abstain atau blanko akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
- Pemegang Saham/kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai mengeluarkan suara setuju atas usul yang diajukan
- Pemegang Saham/kuasanya yang memberikan suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham

H. Hasil Pengambilan Keputusan Rapat :

	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Mata Acara Rapat 1	923.095	-	1.636.461.453	1.637.384.548
Mata Acara Rapat 2	485	-	1.637.384.063	1.637.384.548
Mata Acara Rapat 3	315.685	15.113.848	1.621.955.015	1.622.270.700
Mata Acara Rapat 4	923.095	13.401.962	1.623.059.491	1.623.982.586
Mata Acara Rapat 5	485	54.715.812	1.582.668.251	1.582.668.736

I. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan mereka tertanggal 19 Februari 2021 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, maka semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(acquit et decharge)* atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 833.089.603.253,00 sebagai berikut:

1) A. Sebesar Rp 195,00 per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp 42,00 per lembar saham yang telah dibayarkan pada tanggal 19 Oktober 2020. Sehingga sisanya sebesar Rp 153,00 per lembar saham akan dibayarkan pada tanggal 10 Mei 2021 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 April 2021 pukul 16.00 WIB.

B. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.

Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan dan ketentuan lainnya yang berlaku; dan

2) Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Mata Acara Ketiga:

A. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Anggota Direksi
Presiden Direktur : Santosa
Direktur : Mario Casimirus Surung Gultom
Direktur : Muhammad Hadi Sugeng Wahyudiono
Direktur : Rujito Purnomo
Direktur : Nico Tahir
Direktur : Said Fakhrullazi
Direktur : Eko Prasetyo

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Chiew Sin Cheok
Komisaris : Johannes Loman
Komisaris Independen : Sidharta Utama
Komisaris Independen : Aridono Sukmanto

masing-masing untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2021 sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tahun 2023.

B. 1) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;serta

2) Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, memberikan honorarium maksimum sejumlah Rp.2.750.000.000,00 per tahun sebelum dipotong pajak, yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2023, dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Keempat:

1. Menunjuk kantor Akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers, yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021;dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan antara lain dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk :
a. melakukan perubahan dan/atau penambahan apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi Anggaran Dasar perusahaan publik.
b. menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan Rapat, dengan hak subtitusi dalam satu atau beberapa akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas seluruh atau sebagian keputusan rapat Mata Acara termasuk melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut, dan untuk memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi pemerintah terkait.

Sehubungan dengan Mata Acara Rapat Kedua, berikut ini kami sampaikan ketentuan dan tata cara mengenai pembagian dividen :

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN :

Jadwal pelaksanaan pembayaran Dividen Final.

No	Kegiatan	Tanggal
1	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negoisasi	22 April 2021
2	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negoisasi	23 April 2021
3	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	26 April 2021
4	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	27 April 2021
5	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen *(Record Date)*	26 April 2021
6	Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2020	10 Mei 2021

Tata Cara Pembayaran:

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada *Record Date* pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
3. a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik) pembayaran dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra ("Registra"), Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav.47-48, Jakarta Selatan, Telepon (6221) 2525666, Fax (6221) 2525028 paling lambat tanggal *Record Date* pukul 16.00 WIB dengan disertai fotocopy KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermaterai cukup.
b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembagian dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Perseroan tidak melayani permintaan Pemegang Saham untuk mengalihkan haknya atas dividen kepada Pihak lain.
5. Dividen yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan/perundang-undangan yang berlaku dan khusus bagi;
a. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, dimohon agar menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal *Record Date* pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau Registra tidak menerima NPWP, maka dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak mempunyai NPWP.
b. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI tersebut, maka dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya tidak mempunyai P3B dengan Negara Republik Indonesia.

Jakarta, 16 April 2021
PT Astra Agro Lestari Tbk
Direksi